

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan keuangan desa masalah yang sering dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Padahal pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Jika laporan keuangan desa dilaksanakan dengan baik, maka kinerja desa akan meningkat. Kenyataan yang terjadi terkait laporan keuangan desa yang ada pada saat ini, secara prinsip masih banyak permasalahan desa terkait laporan keuangan, antara lain: kurangnya perangkat desa dalam memahami peraturan pemerintahan dan perundang-undangan yang terkait dengan transparansi, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi, dan kepentingan aktor maupun lembaga pemerintah desa.

Yang terjadi di Desa Panggisari adalah pelaporan keuangan desa masih berorientasi keatas, belum sampai pada tingkat bawah. Memang Desa Panggisari telah berusaha melakukan transparansi anggaran dengan memasang baliho. Namun, masyarakat tidak mengetahui dengan detil anggaran tersebut karena yang tertera pada baliho hanya laporan keuangan dalam bentuk akhir atau dana besarnya saja. Padahal pada tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Predikat ini diharapkan sesuai dengan progres pembangunan di Banjarnegara. Dengan melihat pada fenomena di Desa Panggisari dapat dipahami

bahwa kabupaten yang sudah mempunyai predikat WTP justru tidak menjamin pelaksanaan yang sama di tingkat desa.

Kejanggalan keuangan di Desa Panggisari tidak lepas dari laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Panggisari setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan yang telah dibuat tidak menutup kemungkinan masih ada celah bagi oknum untuk melakukan tindak penyelewengan keuangan desa. Sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggisari baru pada tahap penganggaran dan pelaporan saja dan belum menyajikan data anggaran dan pelaporan yang detail.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, prinsip transparansi pelaporan keuangan di perdesaan masih belum maksimal karena disebabkan : penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Sedangkan yang terjadi di Desa Panggisari adalah laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan bukti transaksi. Untuk menangani hal tersebut perlu adanya pengembangan kebijakan pelaporan keuangan desa yang transparan. Rekomendasi tersebut berupa pemanfaatan web desa yang terhubung dengan siskeudes sebagai media *online* yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. *Website* desa yang terhubung dengan siskeudes dapat digunakan sebagai sistem anggaran transparan dengan fitur *e-planning* dan *e-budgeting* mengikuti apa yang telah berhasil terimplementasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era kepemimpinan Ahok yang dapat diakses seluruh masyarakat. Fitur yang *open data* dengan menjabarkan rincian anggaran hingga ke nominalnya dan terbuka. Sehingga masyarakat desa

dapat mengawasi setiap perubahan anggaran yang dimasukkan dalam *website* desa yang detil sampai keangka-angkanya, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan.

Jika dirasa sulit terealisasi rekomendasi tersebut, bisa menggunakan cara lain dengan pelaporan yang tercantum dalam *siskeudes diupload* ke *website* desa dengan format *excel* atau *pdf*. Sehingga masyarakat Desa Panggisari tidak hanya mendapatkan laporan keuangan yang menyajikan konten *website* yang menampilkan data pertanggungjawaban keuangan secara garis besar tapi juga dapat masyarakat juga dapat melihat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara detil.

Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Sehingga praktek-praktek manipulatif yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihindarkan. Dan juga rekomendasi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dikaji dan dimanfaatkan pentingnya *website* desa sebagai sarana transparansi pelaporan keuangan yang detil dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada teknologi digital dan industri 4.0. Dengan demikian harus ada pengelolaan sekaligus pelaporan keuangan yang baik agar dana yang ada bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengelolaan pemerintahan yang baik khususnya dimensi transparansi. Sudah saatnya *good governance* bukan hanya dicanangkan di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dirintis mulai tingkat desa.

## 5.2 Saran

Akuntabilitas sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelaporan secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya transparansi dapat membentuk suatu *check and balance* dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang tepat.

Untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa Panggisari, peneliti memberikan rekomendasi kebijakan yang telah disebutkan dalam pembahasan. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan oleh pemerintah desa. Sehingga praktek-praktek manipulatif yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihindarkan. Dan juga rekomendasi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dikaji dan dimanfaatkan pentingnya *website* desa sebagai sarana transparansi pelaporan keuangan yang detil dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada teknologi digital dan industri 4.0. Dengan demikian harus ada pengelolaan sekaligus pelaporan keuangan yang baik agar dana yang ada bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengelolaan pemerintahan yang baik khususnya dimensi transparansi. Sudah saatnya *good governance* bukan hanya dicanangkan di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dirintis mulai tingkat desa.